

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SABANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

YAMUAZIN
NPM. 1702110095



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YAMUAZIN
NPM : 1702110095

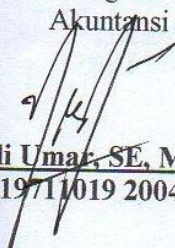
Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAN *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG**

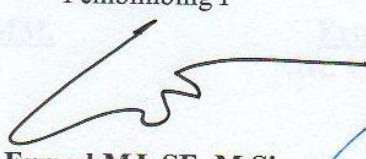
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

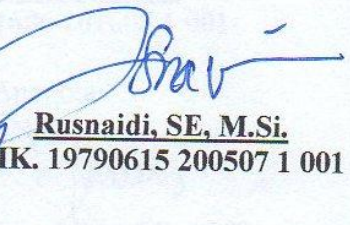
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

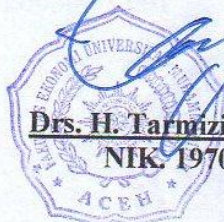

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Pembimbing II


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YAMUAZIN
NPM : 1702110095

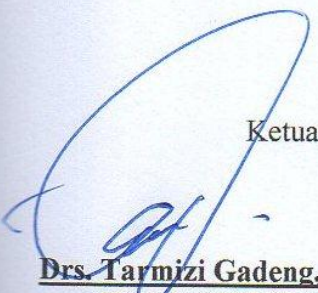
Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAN *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG**

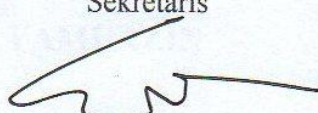
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 16 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

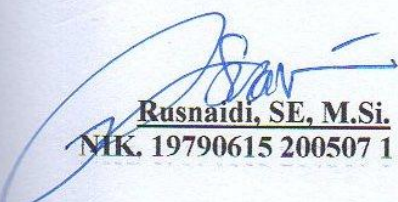
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

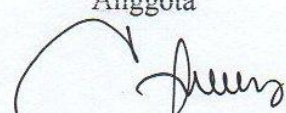
Sekretaris


Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Anggota


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota


Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 26 Agustus 2023

Yang Menyatakan



YAMUAZIN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yamuazin
NPM : 1702110095
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Agustus 2023

Yang Menyatakan



YAMUAZIN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan sekaligus selaku pembimbing kedua penulis.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Bapak Ermad, MJ, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Rusnaidi, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	10
2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	10
2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	12
2.1.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	13
2.1.2 Pengalaman Kerja Auditor.....	13
2.1.2.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerin-	
tahan.....	14
2.1.2.2 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	17
2.1.2.3 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerin-	
tahan.....	17
2.1.3 <i>Good Governance</i>	18
2.1.3.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	18
2.1.3.2 Tujuan <i>Good Governance</i>	20
2.1.3.3 Indikator <i>Good Governance</i>	21
2.2 Penelitian Sebelumnya	22
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	
dengan Kualitas Laporan Keuangan	26
2.3.2 Hubungan <i>Good Governane</i> dengan Kualitas Laporan	
Keuangan	27
2.4 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.2.1 Populasi Penelitian.....	32
3.2.2 Sampel Penelitian.....	33
3.3 Skala Pengukuran	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	33
3.5 Teknik Analisis Data	36

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis	36
3.7 Pengujian Data	38
3.7.1 Uji Validitas	38
3.7.2 Uji Reliabilitas	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Sabang	40
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Sabang	40
4.1.3 Karakteristik Responden	41
4.1.4 Statistik Deskriptif	44
4.1.4.1 Kualitas Laporan Keuangan	45
4.1.4.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	46
4.1.4.3 <i>Good Governance</i>	47
4.1.5 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas	48
4.1.5.1 Hasil Uji Validitas	48
4.1.5.2 Hasil Uji Reliabilitas	49
4.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis	50
4.1.6.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama	51
4.1.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	51
4.1.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	52
4.1.3 Koefisien Determinasi	52
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	53
4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	54
4.2.3 Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1	Populasi Penelitian	32
Tabel 3.2	Skala Pengukuran	34
Tabel 3.3	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 4.1	Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	41
Tabel 4.2	Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.3	Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.4	Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	43
Tabel 4.5	Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	44
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.7	Gambaran Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Sabang	45
Tabel 4.8	Gambaran Penerapan Standar Akutansi Pemerintah pada Kota Sabang	46
Tabel 4.9	Gambaran <i>Good Goverance</i> pada Pemerintahan Kota Sabang	47
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	62
Lampiran 2	Tabulasi Data Penelitian.....	66
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	67
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas <i>Good Governance</i>	68
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas Kualitas Laporan Keuangan.....	69
Lampiran 6	Karakteristik Responden	70
Lampiran 7	Hasil <i>Output</i> SPSS.....	72

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SABANG**

YAMUAZIN
1702110095

Pembimbing : 1.) Ermad MJ, SE, M.Si.
2.) Rusnaldi, SE, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara bersama-sama (simultan) maupun individu (parsial). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Sabang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 35 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individu (parsial).

Kata Kunci: kualitas laporan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance*.

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS AND GOOD GOVERNANCE ON QUALITY OF FINANCIAL
REPORTS SABANG CITY GOVERNMENT**

YAMUAZIN
1702110095

Pembimbing : 1.) Ermad MJ, SE, M.Si.
2.) Rusnaldi, SE, M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementation of government accounting standards and good governance on quality of financial reports, both jointly (simultaneously) and individually (partially). This type of research uses quantitative research. The population in this study were all employees at sabang city government. The sample in this study were 35 respondents. The technique of collecting data using a questionnaire obtained by distributing 35 to the respondents. The analytical method used is multiple linear regression. The results of this study found that implementation of government accounting standards and good governance had a significant effect on quality of financial reports, both together (simultaneously) and individually (partially).

Keywords : quality of financial reports, implementation of government accounting standards and good governance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut suatu instansi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada era globalisasi pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk mengatur tata kelola yang baik. Pemerintahan yang baik adalah keberhasilan dalam menjalankan tugas guna membangun sebuah negara selaras dengan tujuan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tersebut setiap pemerintah wajib mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terutama ialah keuangan.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaannya untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pada umumnya pemerintah dibentuk sebagai layanan terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan layanan dimasa yang akan datang dan pemerintah mempunyai kemajuan yang pada akhirnya mampu melayani masyarakat dengan baik.

Sebuah sistem pemerintahan yang baik memerlukan penguatan sistem dari kelembagaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerah salah satunya yang terpenting adalah sumber daya keuangan.

Demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, maka perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memperhatikan kompetensi sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan tersebut. Sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan gambaran dari posisi keuangan menyeluruh dari setiap entitas. Sehingga penting bagi manajemen dan pegawai untuk menyusun laporan keuangan yang konsisten dengan fakta yang sebenarnya. Tingkat pengungkapan dibuat secara jelas dan terperinci untuk membantu pengguna supaya mudah memahami isi dan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif pada suatu laporan keuangan yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mahmudi (2019:54) Kualitas laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik,

sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Untuk itu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian terjadi penggantian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Mardiasmo (2014:88) mengatakan, instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan

adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik.

Menurut Nasrudin (2017:2) sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Semakin baik sumber daya manusia yang ada dalam suatu instansi maka semakin baik pula pekerjaan yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami. Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan *good governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Apriyono (2016:71) mengungkapkan bahwa pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan *good governance*. Priansa (2018:42) mendefinisikan “*good governance* sebagai suatu sistem dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang makmur, sejahtera, dan mandiri.

Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Sabang mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemberian opini WTP dari BPK tersebut karena LKPD Kota Sabang dianggap telah memperhatikan keseuaian SAP, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Walaupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Sabang untuk tahun 2019 mendapatkan opini WTP, namun masih ada beberapa temuan

dan rekomendasi dari BPK yang menemukan beberapa kelemahan dengan penerapan SAP. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu penataan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut memberikan informasi bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang masih kurang baik.

Dalam teorinya, Mahsun (2016:42) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, diperlukan suatu standar akuntansi. Hal ini bersifat wajib, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Teori tersebut juga dibenarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Octaviani (2020) yang menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang diterapkan dalam suatu instansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut.

Stice, dkk. (2019:117) menyebutkan bahwa penerapan *good governance* dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsipnya yaitu keterbukaan, keterlibatan masyarakat, taat hukum dan akuntabel agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu instansi lebih bertanggungjawab untuk mengelola dana sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarnani dan Dewi (2022) yang menemukan bahwa penerapan *good governance* mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun teori tersebut tidak sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, dkk. (2019) yang menemukan fakta bahwa *good governance* tidak mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Demikian pula hasil penelitian dari Hanifah dan Haryanto (2021) yang juga menyatakan bahwa *good governance* tidak memberikan kontribusi dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
3. Apakah *good governance* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
2. Untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
3. Untuk menguji *good governance* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan valid, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

- a) Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- b) Menambah literatur dan acuan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- c) Bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

- d) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Manajemen atas kinerja individual dengan menggunakan teori perilaku. Diharapkan juga bahan bagi peneliti lainnya yang nantinya dapat ditindaklanjuti bahkan dilakukan pada penelitian yang berbeda terhadap masalah-masalah lain yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b) Pemerintah Kota Sabang dapat digunakan sebagai masukan atau informasi untuk membantu dalam serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan sesama pengguna laporan keuangan pemerintah.

Goo dan Lamawitak (2021:91) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk laporan data yang sangat berharga bagi *user* (pengguna), untuk membuat daftar pembuktian pemakaian keuangan, sehingga pemerintah harus memiliki kerangka data yang layak dan dapat dipercaya.

Menurut Zarkasyi (2018:34) kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan.

Fahmi (2014:66) Kualitas laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data finansial, dan semakin mendekati kebenaran. Laporan keuangan suatu instansi akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan instansi tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Mahmudi (2019:56) mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan informasi untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Apabila laporan keuangan berkualitas baik maka dapat dikatakan orang yang bertanggungjawab atas suatu laporan keuangan berhasil dalam menjalankan tugasnya dan telah mampu meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Tuasikal (2017) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan yaitu penjelasan mengenai keuangan yang memiliki kriteria perhitungan kepatuhan melalui SAP, ketaatan perundangundangan, ketaatan hukum dan arahan, dan kecukupan susunan pengendalian sistem intern. Kualitas laporan keuangan menjadi suatu pertanggungjawaban, apabila kualitas laporan keuangan dilakukan dengan baik maka akan memberikan pertanggungjawaban yang baik pula atas penjelasan terkait uang yang dibuat, hal ini akan mempengaruhi penyusunan kesimpulan terhadap kewajaran data anggaran yang ditampilkan.

Erlina dan Rasdianto (2015) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat 4 (empat) karakteristik merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Government Accounting Standard Board (2013:54) adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya
2. Melaporkan hasil operasi
3. Melaporkan kondisi keuangan
4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai:

1. Pengurusan dan ketaatan
2. Kondisi keuangan
3. Kinerja
4. Dampak ekonomi

2.1.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan yang terdiri dari (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik (indikator) tersebut dirincikan sebagai berikut (Mahmudi, 2019:68):

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2014) mendefenisikan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan-perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku.

Akuntansi pemerintahan menurut Rachmat (2017:19) merupakan sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan yang bersifat

kuantitatif mengenai keuangan yang berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi.

Menurut Singkali & Widuri (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan.

Baridwan (2018:14) akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Dedi (2018:25) Standar akuntansi pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan

keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Tanjung (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Menurut Sujarweni (2015) penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Menurut Bastian (2010:137) salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

2.1.2.2 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2019:29) tujuan utama diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pengguna laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, maka pelaporan keuangan lebih berkualitas.

Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki tujuan untuk:

1. Akuntabilitas
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparansi
memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada *stakeholder*.
4. Keseimbangan antargenerasi
memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2.1.2.3 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Tanjung (2017) indikator dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

3. Pelaporan

Pelaporan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pemakai, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya.

4. Pengungkapan

Pengungkapan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berhubungan dengan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat selain apa yang dinyatakan melalui laporan keuangan.

2.1.3 Good Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Governance

Menurut Mardiasmo (2014:17) *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *good governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Hefita (2018) menjelaskan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut Koiman (2019:273) *good governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Good governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Menurut Prasetya (2015) manfaat yang diterima dari melaksanakan *good governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

Menurut Widodo (2014:18) konsep *good governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai pelaku diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Menurut Hasyim (2014) *good governance* ialah kesepakatan menyangkut pengaturan suatu wilayah yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka.

Priansa (2018) *good governance* merupakan sistem dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita cita terbentuknya masyarakat madani yang makmur, sejahtera, dan mandiri.

Mas'ud (2017:18) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif dan efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, keterbukaan informasi dan perlakuan adil dalam seluruh bidang pemerintahan sehingga visi, misi dan tujuan pemerintahan serta tujuan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.3.2 Tujuan *Good Governance*

Menurut Kurniawan (2015:12) adapun tujuan *good governance* adalah mewujudkan penyelenggaran pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efesiensi dan efektivitas dengan menjaga kesinergian interaksi dan konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Selain itu, Delly (2018) mengemukakan bahwa tujuan *good governance* tercapai disuatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh internal sendiri yang

membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri.

Untuk tercapainya *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang ditetapkan (Sedarmayanti, 2019).

2.1.3.3 Indikator *Good Governance*

Mas'ud (2017:18) menjelaskan *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kemampuan moral dalam suatu penyelenggara pelayanan publik yang prima, menciptakan kepercayaan timbal balik, antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan juga memiliki sarana dan prasarana dan serta pelayan yang ramah dan disiplin. Adapun indikator *good governance* yaitu:

1. **Transparansi**
Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan dan lain-lain.
2. **Partisipasi**
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
3. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Agustiningtyas, dkk. (2020) meneliti tentang pengaruh *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Malang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya Hosana, dkk. (2020) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian membuktikan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian Rahmawati, dkk. (2018) yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya Sihite dan Holiawati (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD

Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Oktarina, dkk. (2016) yang berjudul pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya Nugraeni dan Budiantara (2015) dengan judul pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan akuntabilitas kinerja terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk lebih jelas, berapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh <i>good governance</i> , sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya	Metode Kuantitatif	<i>Good governance</i> , sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap	1. Kualitas laporan keuangan 2. <i>Good governance</i>	1. Sistem pengendalian intern 2. Kompetensi sumber daya manusia - Objek

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Malang, Agustiningtyas, dkk. (2020)		kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan		penelitian pada penelitian ini yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.
2.	Pengaruh <i>good governance</i> dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Hosana, dkk. (2020)	Metode Kuantitatif	<i>Good governance</i> dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	1. Kualitas laporan keuangan 2. <i>Good governance</i>	1. Sistem pengendalian intern - Objek penelitian pada penelitian ini yaitu pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
3.	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan, Rahmawati, dkk. (2018)	Metode Ekplanatori dengan Pendekatan Kuantitatif	Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	1. Kualitas laporan keuangan 2. Penerapan standar akuntansi pemerintah	1. Pemanfaatan teknologi informasi 2. Sistem pengendalian intern - Objek penelitian pada penelitian ini yaitu SKPD Kota Tangerang Selatan.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Sihite dan Holiawati (2017)	Metode Deskriptif Kuantitatif	Standar Akuntansi Pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	1. Kualitas laporan keuangan 2. Standar akuntansi pemerintah	1. Sistem pengendalian intern 2. Kompetensi staff akuntansi - Objek penelitian pada penelitian ini yaitu SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan
5.	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang, Oktavina, dkk. (2016)	Metode Statistik Deskriptif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	1. Kualitas laporan keuangan 2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan 3. <i>Good governance</i>	1. Kualitas aparatur pemerintah - Objek penelitian pada penelitian ini yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang
6.	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan akuntabilitas kinerja	Metode Kuantitatif	Standar Akuntansi Pemerintah dan akuntabilitas kinerja	1. Kualitas laporan keuangan 2. Standar akuntansi pemerintah	1. Akuntabilitas kinerja - Objek penelitian pada

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, Nugraeni dan Budiantara, (2015)		berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.		penelitian ini yaitu SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2017) penerapan standar akuntansi pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antaragenerasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.

Nordiawan dan Ayuningtyas (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemendepartemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini

akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Sebaliknya semakin buruk penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin buruk pula kualitas laporan keuangan.

Kuntadi, dkk. (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

2.3.2 Hubungan *Good Governance* dengan Kualitas Laporan Keuangan

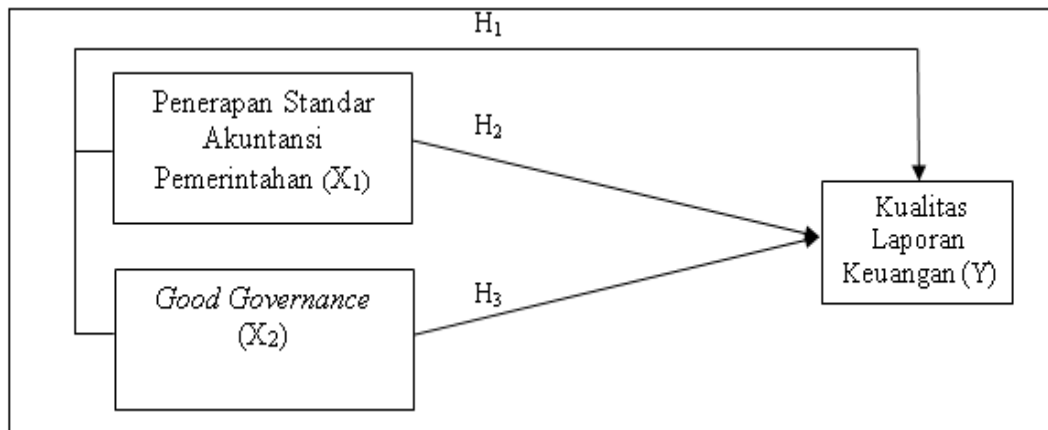
Mulyadi (2018) menyebutkan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Mahsun, dkk. (2016) mengemukakan bahwa *good governanec* merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola

daerahnya dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi kemakmuran masyarakat. Pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pada masyarakat dan pemerintah secara efektif dengan menerapkan karakteristik *good governance* sangat potensial untuk menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka dengan semakin baiknya *good governance* yang ada pada suatu instansi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan instansi tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika *good governance* tidak berjalan dengan baik dalam suatu instansi akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

Putra dan Gea (2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan suatu organisasi, *good governance* memberikan dukungan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pemangku kepentingan akan melihat praktik tata kelola organisasi yang baik yang disajikan dalam laporan keuangan, yang akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola organisasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, praktik tata kelola organisasi yang baik juga merupakan bentuk tanggungjawab organisasi kepada pemangku kepentingan, dengan menyediakan data yang akurat, andal, dan akuntabel melalui pelaporan keuangan.

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan diatas, maka skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁: penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
- H₂: penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota.
- H₃: *good governance* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:61), desain penelitian merupakan rancangan utama penelitian yang menyatakan metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis data akhir.

Sekaran dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1) Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran dan Bougie, 2013). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* serta variabel tidak bebas yaitu kualitas laporan keuangan.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu metode analisa yang setiap variabelnya

diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Menurut Sugiyono (2012:2) penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* tetap terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang saat diperoleh. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa kuesioner yang disebar, dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

4) Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

5) Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yang terdiri atas variabel independen yakni penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* dan variabel dependen yakni kualitas laporan keuangan.

6) Horizon waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan sebagai jenis studi *one shoot*, yaitu penelitian yang pengambilan datanya dilakukan melalui pengisian kuesioner hanya dalam satu waktu, yaitu data dikumpulkan sekali kumpul saja.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi ialah suatu kelompok orang, kejadian, ataupun segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi yang ada pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam transaksi keuangan/akuntansi, pegawai/staf perencanaan dan pelaporan keuangan serta pegawai/staf pemegang kas pada struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang yang berjumlah 35 orang yang bekerja pada Pemerintah Kota Sabang. Adapun rincian 35 orang tersebut dirincikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Bagian	Jumlah
1.	Pemerintahan	5
2.	Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	4
3.	Hukum	3
4.	Perekonomian dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam	4
5.	Administrasi Pembangunan	4
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	4

7.	Umum	5
8.	Organisasi	3
9.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3
Total		35

Sumber: Pemerintah Kota Sabang, 2023 (data diolah)

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Arikunto (2006) menyatakan bahwa apabila sampel yang diteliti kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, metode ini dikenal dengan penelitian sensus. Jadi dapat dinyatakan pengamatan pada penelitian ini sebanyak 35 orang pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Sabang.

3.3 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan suatu model angket yang digunakan dengan menggunakan angket multikotomis (banyak pilihan jawaban) dimana subjek memiliki lima alternatif tanggapan dengan menggunakan skala Likert. Skala ini berhubungan dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. Dalam kuisioner penelitian ini pernyataan mulai dari sangat tidak setuju (STS) skor 1, tidak setuju (TS) skor 2, kurang setuju (KS) skor 3, setuju (S) skor 4 sampai dengan pernyataan sangat setuju (SS) skor 5. Sekaran dan Bougie (2013:99) menyatakan pengukuran skala dalam penelitian menggunakan skala likert, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Kurang Setuju	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

Sumber: Sekaran dan Bougie (2013:99)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable merupakan suatu penjelasan dari pada variabel-variabel yang ada pada penelitian. adapun variabel-variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel dependen atau tidak bebas

Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No.71/2010 kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi. Adapun indikator kualitas laporan keuangan yaitu (Peraturan Pemerintah No. 71/2010): (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami.

2. Variabel independen atau bebas

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel independen, yaitu:

a. Penerapan standar akuntansi pemerintahan

Menurut Tanjung (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam

mengelola penerimaan dan penggunaan dana. Adapun indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu (Tanjung, 2017): (1) pengakuan; (2) pengukuran; (3) pelaporan; dan (4) pengungkapan.

b. *Good governance*

Menurut Mas'ud (2017:18) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab. Adapun indikator *good governance* yaitu (Mas'ud, 2017:18): (1) transparansi; (2) partisipasi; dan (3) akuntabilitas.

Defenisi dan Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terangkum dalam

Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Defenisi dan Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi (Peraturan Pemerintah No.71/2010)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert	A1-A4
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	Standar akuntansi pemerintahan adalah landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana (Tanjung, 2017)	1. Pengakuan 2. Pengukuran 3. Pelaporan 4. Pengungkapan	Likert	B1-B4

Tabel 3.3 Lanjutan

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item
3	<i>Good Governance</i> (X ₂)	<i>Good governance</i> merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab (Mas'ud, 2017:18)	1. Transparansi 2. Partisipasi 3. Akuntabilitas	Likert	C1-C3

Sumber: Data diolah, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

X₁ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X₂ = *Good Governance*

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

e = Standar *Error*

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis, yaitu:

- H₁: penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
- H₂: penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
- H₃: *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

Untuk melihat penerimaan dan penolakan ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil *output* SPSS versi 23. Adapun kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis pertama:

- a) Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β_1 , & β_2), atau semua nilai signifikan sama dengan nol (P_{yx1} & $P_{yx2} = 0$), maka H₁ ditolak. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance*, tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
- b) Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol ($\beta_1, \beta_2 \neq 0$), atau salah satu nilai signifikan tidak sama dengan nol (P_{yx1} atau $P_{yx2} \neq 0$), maka H₁ diterima. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

2. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis kedua:

- a) Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1=0$), atau nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan ($P_{yx1} > 0,05$) maka H_2 ditolak. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
 - b) Jika koefisien regresi variabel X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), atau nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan ($P_{yx1} < 0,05$), maka H_2 diterima. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
3. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis ketiga:
- a) Jika koefisien regresi variabel X_2 sama dengan nol ($\beta_2=0$), atau nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan ($P_{yx2} > 0,05$), maka H_3 ditolak. Artinya *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
 - b) Jika koefisien regresi variabel X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), atau nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan ($P_{yx2} < 0,05$) maka H_3 diterima. Artinya *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

3.7 Pengujian Data

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari *instrument* (kuisisioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh. Suatu kuesioner

dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2015:95). Sebuah *instrument* dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat dan mempunyai validitas tinggi, tinggi rendahnya validitas *instrument* menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki realibilitas tinggi, yaitu mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya, disebut sebagai reliabel. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Dalam penelitian ini, tolak ukur reliabilitas suatu kuesioner adalah nilai *alfa cronbach* yang diperoleh melalui perhitungan statistik. Malhotra dan Bontis (2015) menyatakan nilai *alfa cronbach minimum* yang dapat diterima adalah 0,60. Hal ini berarti suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai *alfa cronbach* yang diperoleh berada diatas 0,60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Sabang

Pada tahun 1965 Kotapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965. Sehingga pada tahun 1970 dikeluarkan UU No. 3 tahun 1970 dan No. 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan Sabang dan tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengusahakan persediaan (*stockpiling*) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri.
2. Melakukan peningkatan mutu (*upgrading*), pengolahan (*processing*), manufacturing, pengepakan (*packing*), pengepakan ulang (*repacking*), dan pemberian tanda dagang (*marking*).
3. Menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu lintas perdagangan, dan perhubungan.
4. Menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transito, dan lain-lain.
5. Mengusahakan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya *shopping centre*. Mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Sabang

Adapun visi Pemerintah Kota Sabang yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Sabang Yang Mandiri, Sejuk, Tentram Yang Berbasis Wisata Maritim Dan Berazaskan Syariat Dengan Semangat Kebersamaan (Ulama Dan Umara)”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Pemerintah Kota Sabang yaitu:

1. Pengembangan bidang agama; syariat islam dan hubungan antar umat beragama
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang bisa bersaing di era global.
3. Bidang pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan.
4. Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah.
5. Bidang pariwisata: membangun pola pikir yang penuh inovatif dalam mengelola sumber pariwisata kota sabang agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik turis mancanegara dan turis lokal dengan kearifan lokal sebagai daerah syariat.
6. Meningkatkan infrastruktur, pelayanan air bersih, listrik dan rumah dhuafa.
7. Mengelola sumber daya air dan energi listrik.
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi tata kelola pemerintahan.
9. Peningkatan pendapatan asli daerah dan APBK daerah.

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan yang ditangani dan lama bekerja.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Pada Tabel 4.1 disajikan hasil uji deskripsi karakteristik responden berdasarkan umur.

Tabel 4.1
Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 25 Tahun	7	20,0	20,0	20,0
	26 - 35 Tahun	8	22,9	22,9	42,9
	36 - 45 Tahun	12	34,3	34,3	77,1
	46 - 55 Tahun	5	14,3	14,3	91,4
	Diatas 56 Tahun	3	8,6	8,6	100,0
Total		35	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berumur 36 – 45 tahun yaitu sebanyak 12 orang atau 34,3%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini pada Tabel 4.2 disajikan hasil uji deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lak-laki	32	91,4	91,4	91,4
	Perempuan	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji deskripsi bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 91,4% dan berjenis kelamin Perempuan sebanyak 3 orang atau sebesar 8,6%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut ini pada Tabel 4.3 disajikan hasil uji deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma III	1	2,9	2,9	2,9
	Sarjana	28	80,0	80,0	82,9
	Pascasarjana	6	17,1	17,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 80%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut ini pada Tabel 4.4 disajikan hasil uji deskripsi karakteristik responden berdasarkan jabatan.

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bagian Pemerintahan	5	14,3	14,3	14,3
	Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	4	11,4	11,4	25,7
	Bagian Hukum	3	8,6	8,6	34,3
	Bagian Perekonomian dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam	4	11,4	11,4	45,7
	Bagian Administrasi Pembangunan	4	11,4	11,4	57,1
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	11,4	11,4	68,6
	Bagian Umum	5	14,3	14,3	82,9
	Bagian Organisasi	3	8,6	8,6	91,4
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa ada 9 (sembilan) bagian pada struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang, dan tiap-tiap bagian diwakili oleh 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang responden.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berikut ini pada Tabel 4.5 disajikan hasil uji deskripsi karakteristik responden berdasarkan lama bekerja.

Tabel 4.5
Hasil Uji Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dibawah 5 Tahun	2	5,7	5,7	5,7
6 - 10 Tahun	6	17,1	17,1	22,9
11 - 15 Tahun	8	22,9	22,9	45,7
16 - 20 Tahun	10	28,6	28,6	74,3
21 - 25 Tahun	5	14,3	14,3	88,6
Diatas 26 Tahun	4	11,4	11,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah bekerja pada Pemerintah Kota Sabang selama 16 – 20 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 28,6%.

4.1.4 Statistik Deskriptif

Data yang diuji yaitu meliputi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *good governance* sebagai variabel independen, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif dari data penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	140	1,00	5,00	3,7786	,92190
Good Governance	105	1,00	5,00	3,8571	,97496
Kualitas Laporan Keuangan	140	1,00	5,00	3,5786	,98964
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Dari hasil Tabel 4.6 dapat dilihat nilai rata-rata, terendah dan tertinggi variabel yang diteliti pada pegawai Pemerintah Kota Sabang. Rata-rata jawaban penerapan SAP sebesar 4,09. Rata-rata jawaban *good governance* sebesar 3,73. Dan rata-rata jawaban kualitas laporan keuangan sebesar 3,66.

4.1.4.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2019:56) kualitas laporan keuangan merupakan informasi untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Apabila laporan keuangan berkualitas baik maka dapat dikatakan orang yang bertanggungjawab atas suatu laporan keuangan berhasil dalam menjalankan tugasnya dan telah mampu meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Adapun gambaran kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Sabang sebagai berikut:

Tabel 4.7
Gambaran Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Sabang

No.	Kualitas Laporan Keuangan	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	%	Fr	%
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu.	0	0	0	0	2	5,7	31	88,6	2	5,7	4
2	Transaksi yang disajikan oleh tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.	0	0	0	0	9	25,7	23	65,7	3	8,6	3,83
3	Laporan keuangan yang disusun oleh tempat saya bekerja disajikan secara sistematis sehingga mudah dimengerti oleh pengguna.	0	0	2	5,7	8	22,9	13	37,1	12	34,3	4
4	Informasi keuangan yang disajikan oleh tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	3	8,6	9	25,7	16	45,7	6	17,1	1	2,9	2,8
Rerata												3,66

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Sabang sudah relatif baik dengan rata-rata jawaban responden

3,66 unit skala likert. Angka tersebut mendekati nilai 4 (skor untuk pilihan jawaban Setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab Setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang variabel kualitas laporan keuangan.

4.1.4.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Singkali & Widuri (2014) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Adapun gambaran penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Kota Sabang sebagai berikut:

Tabel 4.8
Gambaran Penerapan Standar Akutansi Pemerintah pada Kota Sabang

No.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	%	Fr	%
1	Pencatatan asset dan modal telah didukung dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan	0	0	0	0	1	2,9	28	80	6	17,1	4,14
2	Pengelolaan keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan.	0	0	1	2,9	8	22,9	21	60	5	14,3	3,86
3	Seluruh pengelolaan keuangan dilaporkan tepat waktu.	1	2,9	0	0	1	2,9	24	68,6	9	25,7	4,14
4	Laporan keuangan pemerintah mengungkapkan seluruh informasi secara transparan atau jelas.	0	0	0	0	0	0	27	77,1	8	22,9	4,23
Rerata												4,09

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Sabang sudah relatif baik dengan rata-rata

jawaban responden 4,09 unit skala likert. Angka tersebut mendekati nilai 4 (skor untuk pilihan jawaban Setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab Setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.4.3 Good Governance

Koiman (2019:273) mengungkapkan bahwa *good governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Good governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Adapun gambaran *good governance* pada Pemerintahan Kota Sabang sebagai berikut:

Tabel 4.9
Gambaran *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Sabang

No.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Tempat saya bekerja telah melaksanakan transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat mengakses anggaran.	1	2,9	0	0	3	8,6	29	82,9	2	5,7	3,89
2	Dalam menetapkan sesuatu, tempat saya bekerja mengharuskan adanya tujuan bersama masyarakat yang ingin dicapai.	0	0	2	5,7	13	37,1	20	57,1	0	0	3,51
3	Saya mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang saya sebagai salah satu pegawai pengelola keuangan ditempat saya bekerja.	0	0	0	0	7	20	28	80	0	0	3,8
Rerata												3,73

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa *good governance* pada Pemerintah Kota Sabang sudah relatif baik dengan rata-rata jawaban responden 3,73 unit skala likert. Angka tersebut mendekati nilai 4 (skor untuk pilihan jawaban Setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab Setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang variabel *good governance*.

4.1.5 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

4.1.5.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* menggunakan bantuan *software computer* melalui program *Statistic Package for Social Science* (SPSS) 23. Berdasarkan hasil pengolahan data seluruh pernyataan valid karena memiliki nilai signifikansi dibawah 5%.

Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai kolerasi hasil perhitungan yang diperoleh harus dibandingkan dengan nilai kritis kolerasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan semua item pernyataan mempunyai $r\text{-hitung} > \text{nilai kritis kolerasi } product\ moment$ untuk $n = 35$ pada tingkat signifikansi 5%, sehingga semua pernyataan tersebut signifikan dan memiliki validitas konstruk. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai r- kritis n=35	Keterangan
A1	Kualitas Laporan Keuangan	0,854	0,325	Valid
A2		0,678		
A3		0,703		
A4		0,618		
B1	Penerapan SAP	0,741	0,325	Valid
B2		0,686		
B3		0,708		
B4		0,765		
C1	<i>Good Governance</i>	0,844	0,325	Valid
C2		0,732		
C3		0,672		

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa semua pertanyaan pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid, karena mempunyai koefisiensi kolerasi diatas nilai kritis kolerasi *product moment* yaitu sebesar 0,325 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.1.5.2 Hasil Uji Reliabilitas

Untuk menguji kehandalan kuesioner yang digunakan, penelitian ini menggunakan uji reliabilitas. Analisa digunakan untuk menafsirkan kolerasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Hasil uji reliabilitas (Tabel 4.11) untuk variabel dependen dan variabel independen menunjukkan hasil yang reliabel. Nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan > 0.60 sehingga seluruh variabel yang digunakan dinyatakan handal. Berikut ini ditampilkan hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kualitas Laporan Keuangan	4	0,846	Handal
2.	Penerapan SAP	4	0,869	Handal
3.	<i>Good Governance</i>	3	0,865	Handal

Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel berada diatas nilai 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa jawaban pernyataan pada kuesioner Handal.

4.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Hipotesis

Persamaan $Y = 0,071 + 0,532X_1 + 0,537X_2 + e$				
t-value	0,064	3,324	2,756	
Sig. value	0,949	0,002	0,010	
F – value / Sig.	87,875 / 0,00			
R / R ² / Adj. R ²	0,920 / 0,864 / 0,836			

Sumber: Data Primer, tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

4.1.6.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah penerapan SAP dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat nilai koefisien beta (β) penerapan SAP dan *good governance* secara berurutan sebesar 0,532; 0,537 dan nilai signifikan sebesar 0,002; 0,010. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,532 \neq 0$; $0,537 \neq 0$ dan nilai signifikan $0,002 \neq 0$; $0,010 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$ dan $\beta_2 \neq 0$) dan semua nilai signifikan tidak sama dengan nol (P_{yx1} atau $P_{yx2} \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima dan menolak hipotesis. Maka H_1 diterima, artinya penerapan SAP dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

4.1.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat koefisien beta (β) penerapan SAP sebesar 0,532 dan nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,532 \neq 0$ dan $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti nilai koefisien beta penerapan SAP tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$) dan nilai Sig. 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya

nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima dan menolak hipotesis. Maka H_2 diterima, artinya penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

4.1.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat koefisien beta (β) *good governance* sebesar 0,537 dan nilai signifikan sebesar 0,010. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,537 \neq 0$ dan $0,010 < 0,05$. Hal ini berarti nilai koefisien beta *good governance* sama dengan nol ($\beta \neq 0$) dan nilai sig. 0,010 lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima dan menolak hipotesis. Maka H_3 diterima, artinya *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

4.1.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi penerapan SAP dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Tabel 4.12 nilai *R Square* sebesar 0,846. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh penerapan SAP dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 84,6% ($0,846 \times 100\%$). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,4% ($100\% - 84,6\%$) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi kualitas laporan keuangan, baik itu kenaikan ataupun penurunan cukup besar dipengaruhi oleh penerapan SAP dan *good governance*.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linear berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu pengaruh penerapan SAP dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan baik secara bersama-sama maupun individu akan dibahas berikut ini.

4.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian secara bersama-sama dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yang ditentukan berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, H_1 diterima jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol ($\beta_1, \beta_2 \neq 0$) atau salah satu nilai signifikan tidak sama dengan nol (P_{yx1} atau $P_{yx2} \neq 0$).

Nilai koefisien regresi dan nilai signifikan dari kedua variabel independen yaitu penerapan SAP dan *good governance* dapat dilihat pada Tabel 4.12. Dalam Tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa nilai koefisien regresi $\beta_1 = 0,532$, $\beta_2 = 0,537$ dan nilai signifikan $P_{yx1} = 0,002$, $P_{yx2} = 0,010$, sehingga H_1 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan SAP dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

Nilai korelasi antar variabel adalah sebesar 0,920 yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen (penerapan SAP dan *good governance*) dengan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar 92,0%. Dalam hal analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,846 atau sebesar 84,6%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 84,6% variasi kualitas laporan keuangan

dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan SAP dan *good governance*, sedangkan 15,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil ini, maka hendaknya pemerintah khususnya Pemerintah Kota Sabang dapat memperhatikan bahwa penerapan SAP dan *good governance* mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan apabila koefisien regresi variabel $X_1 \neq 0$ ($\beta_1 \neq 0$) atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($P_{yx1} < 0,05$). Nilai koefisien regresi penerapan SAP pada Tabel 4.12 adalah sebesar 0,532 dan nilai signifikan 0,002. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_2 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang. Hal ini berarti bahwa dengan adanya penerapan SAP dengan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang, maka akan mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Sebaliknya, apabila penerapan SAP tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk. (2018), Sihite dan Holiawati (2017), Oktaviana (2016) dan Nugraeni dan Budiantara (2015) yang juga menyatakan bahwa adanya penerapan SAP dalam suatu instansi akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut.

4.2.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan apabila koefisien regresi variabel $X_2 \neq 0$ ($\beta_2 \neq 0$) atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($P_{yx2} < 0,05$). Nilai koefisien regresi *good governance* pada Tabel 4.12 adalah sebesar 0,537 dan nilai signifikan 0,010. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_3 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang. Hal ini berarti bahwa dengan terciptanya *good governance* dalam sebuah instansi, berhasil meningkatkan kinerja pegawai sehingga mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Demikian pula sebaliknya, sebuah instansi yang belum menerapkan *good governance* dalam lingkungan kerjanya, maka akan berdampak pada penurunan kinerja pegawai, yang pada akhirnya tidak mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustiningtyas, dkk. (2020), Hosana, dkk. (2020), dan Oktavina (2016) yang juga menyebutkan bahwa lingkungan kerja dalam suatu instansi yang menerapkan *good governance*, akan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Nuraini, dkk. (2019) serta Hanifah dan Haryanto (2021) yang menyebutkan bahwa *good governance* tidak mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
3. *Good governance* secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah dan seluruh pegawai sepatutnya untuk memperhatikan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* karena mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi pihak Pemerintah Kota Sabang sebaiknya mempertahankan maupun meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* disebabkan kedua faktor tersebut merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas laporan keuangan.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Sabang, maka penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti pada objek lain atau menambah objek lainnya dikarenakan memungkinkan memperoleh hasil yang berbeda.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance*, maka penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lainnya yang diduga juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, Vika E., Irma Tyasari dan Doni W. Y. (2020). Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. 8, (1). 1-15.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Deddi, Nordiawan dan Ayuningtyas, Hartianti. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deddi, Nordiawan. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Delly, Mustafa. (2018). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Erlina, Omar dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfa Beta.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, Amiroh Zumar dan Haryanto. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada Seluruh SKPD Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 10, (4). 1-7.
- Hasyim, A. Dardiri. (2014). *Good Governance dan Piagam Madinah. Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA*.
- Hefita, Sumarto. (2018). *Penerapan Good Governance*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hosana, A. Thea, Rispayanto dan Bambang Widarno. (2020). Pengaruh *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Universitas Slamet Riyadi*. 1, (1). 158-159.
- Indriantoro. Nur & Supomo. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kooiman, Jan. (2019). *Governing as Governance*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntadi, C., Juniarty, E. M. Saragi, Syasyi, I. Syafira. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 3, (5). 458- 459.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEF.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Malhotra dan Bontis. (2014). *Marketing Research An Applied Orientation*. International Edition: Pearson.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraeni dan M. Budiantara. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. 12, (1). 18-33.
- Nuraini, Kirmizi dan Kamaliah (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau. *Pekbis Jurnal*. 11, 3. 210-220.
- Oktarina, Mia, Kharis Raharjo dan Rita Andini. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang. *Journal of Accounting*. 2, (2). 1-15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Prasetya, GE. (2015). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher

Priansa, Donni Juni. (2018). *Manajemen Organisasi Publik Mengembangkan Organisasi Modern Berorientasi Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Putra, R. Rahmat, dan Gea, O. Otraman. (2022). *Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Riset dan Akuntansi*. 6, (3). 2517-2528.

Rachmat. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahmawati, Astika, I Wayan M., Lilik H. Eka. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. 20, (2). 8-17.

Sarnani, Ecin dan Ratna Sari Dewi. (2022). Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin UMN Medan*. 1, (4). 926-935.

Sedarmayanti. (2019). *(Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley Sons.

Sihite, Renny N., dan Holiawati. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal ASET (Akuntansi dan Riset)*. 9, (2). 81-92.

Singkali, O. Y. F., & Widuri, R. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. *Tax & Accounting Review*. 4 (2).

Stice, James D, Earl K. Stice, dan K. Fred Skousen. (2019). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Diterjemahkan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tanjung, A. H. (2017). *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Dyah Rizky dan Andri Octaviani. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. *Journal of Accounting And Financial*. 5, (1). 1-12.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2018). *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfa Beta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I Kuesioner Penelitian

Yth. Saudara Responden

Bersama ini saya mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang”**. Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) menit. Perlu Saudara ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Saudara dalam menjawab pertanyaan.

Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Cara Pengisian Kuesioner

Saudara cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat Saudara. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban dan bila memilih jawaban ‘lain-lain’ maka diharapkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Saudara :

1 = Sangat tidak setuju (STS)

2 = Tidak setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat setuju (SS)

Untuk pertanyaan yang tidak ada angka pilihannya, Saudara diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami pada pekerjaan saat ini.

Hormat Saya,

Yamuazin

IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data dibawah ini.

Nama Responden :

Umur Responden : 1. 20 tahun – 25 tahun ☐
2. 26 tahun – 35 tahun ☐
3. 36 tahun – 45 tahun ☐
4. 46 tahun – 55 tahun ☐
5. diatas 56 tahun ☐

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki ☐
2. Perempuan ☐

Pendidikan Terakhir : 1. SMA ☐
2. D3 ☐
3. S1 ☐
4. S2 ☐
5. S3 ☐

Jabatan yang ditangani :

Lama bekerja ditempat bekerja saat ini : 1. Dibawah 5 tahun ☐
2. 6 tahun – 10 tahun ☐
3. 11 tahun – 15 tahun ☐
4. 16 tahun – 20 tahun ☐
5. 21 tahun – 25 tahun ☐
6. Diatas 26 tahun ☐

DAFTAR PERTANYAAN

Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Mahmudi (2019)

No.	Kuisisioner	STS	TS	KS	S	SS
RELEVAN						
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu.					
ANDAL						
2	Transaksi yang disajikan oleh tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
DAPAT DIPAHAMI						
3	Laporan keuangan yang disusun oleh tempat saya bekerja disajikan secara sistematis sehingga mudah dimengerti oleh pengguna.					
DAPAT DIBANDINGKAN						
4	Informasi keuangan yang disajikan oleh tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber: Tanjung (2017)

No.	Kuisisioner	STS	TS	KS	S	SS
PENGAKUAN						
1	Pencatatan asset dan modal telah didukung dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan					
PENGUKURAN						
2	Pengelolaan keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan					
PELAPORAN						
3	Seluruh pengelolaan keuangan dilaporkan tepat waktu.					
PENGUNGKAPAN						
4	Laporan keuangan pemerintah desa mengungkapkan seluruh informasi secara transparan atau jelas.					

Good Governance

Sumber: Mas'ud (2017)

No.	Kuisisioner	STS	TS	KS	S	SS
TRANSPARANSI						
1	Tempat saya bekerja telah melaksanakan transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat mengakses anggaran.					
PARTISIPASI						
2	Dalam menetapkan sesuatu, tempat saya bekerja mengharuskan adanya tujuan bersama masyarakat yang ingin dicapai.					
AKUNTABILITAS						
3	Saya mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang saya sebagai salah satu pegawai pengelola keuangan ditempat saya bekerja.					

LAMPIRANII Tabulasi Data Penelitian

Responden	Penerapan SAP				Total X.1	Good Governance			Total X.2	Kualitas Lap. Keu				Total Y
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	4	4	4	4	16	4	5	4	13	4	4	4	3	15
2	3	3	2	3	11	2	3	3	8	2	3	2	2	9
3	1	2	2	2	7	1	1	2	4	1	2	1	1	5
4	2	3	2	3	10	2	3	2	7	2	3	3	2	10
5	4	4	4	5	17	4	5	5	14	4	4	4	5	17
6	4	5	5	5	19	5	4	4	13	4	4	5	4	17
7	4	5	5	5	19	4	5	5	14	4	5	4	4	17
8	3	2	3	3	11	2	3	2	7	3	3	3	3	12
9	4	4	5	5	18	4	5	4	13	4	4	5	4	17
10	4	4	5	5	18	4	4	5	13	5	5	5	4	19
11	3	2	3	4	12	3	2	3	8	3	3	2	1	9
12	4	4	4	4	16	4	5	4	13	4	4	5	4	17
13	1	3	3	2	9	2	2	3	7	2	3	2	2	9
14	4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	4	5	2	15
15	5	3	4	4	16	4	4	5	13	3	4	5	2	14
16	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	3	3	14
17	4	4	4	4	16	4	5	4	13	4	4	4	3	15
18	4	4	4	5	17	4	4	5	13	4	4	4	3	15
19	4	4	1	4	13	4	4	5	13	4	3	3	4	14
20	3	3	2	4	12	3	3	2	8	3	3	2	4	12
21	5	4	4	4	17	4	5	4	13	4	5	4	4	17
22	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	4	4	3	15
23	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	4	3	3	14
24	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	3	15
25	4	5	5	4	18	5	5	4	14	4	4	5	5	18
26	4	3	4	4	15	3	4	4	11	4	5	3	4	16
27	4	3	4	4	15	4	4	5	13	4	4	4	5	17
28	5	4	4	4	17	4	4	5	13	4	4	5	4	17
29	5	5	5	5	20	4	4	5	13	4	3	4	4	15
30	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	3	5	4	16
31	4	4	4	4	16	4	5	4	13	4	4	5	2	15
32	2	3	3	1	9	3	2	4	9	2	3	2	1	8
33	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	3	2	13
34	5	4	5	4	18	4	4	5	13	4	4	4	4	16
35	5	3	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	5	17

LAMPIRAN III Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,869	,871	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	3,7714	1,00252	35
X1.2	3,6571	,80231	35
X1.3	3,7714	1,00252	35
X1.4	3,9143	,88688	35

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
X1.1	1,000	,558	,620	,738
X1.2	,558	1,000	,631	,619
X1.3	,620	,631	1,000	,606
X1.4	,738	,619	,606	1,000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,779	3,657	3,914	,257	1,070	,011	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	11,3429	5,408	,741	,594	,825
X1.2	11,4571	6,432	,686	,489	,848
X1.3	11,3429	5,526	,708	,512	,839
X1.4	11,2000	5,812	,765	,615	,815

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,1143	9,869	3,14148	4

LAMPIRAN IV Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas *Good Governance*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,865	,871	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	3,6286	,87735	35
X2.2	3,9143	1,01087	35
X2.3	4,0286	1,01419	35

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3
X2.1	1,000	,792	,706
X2.2	,792	1,000	,576
X2.3	,706	,576	1,000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,857	3,629	4,029	,400	1,110	,042	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	7,9429	3,232	,844	,721	,731
X2.2	7,6571	3,055	,732	,628	,823
X2.3	7,5429	3,197	,672	,500	,879

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,5714	6,664	2,58145	3

LAMPIRAN V Hasil Uji Validitas dan Realiabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,846	,868	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	3,6000	,84714	35
Y.2	3,7714	,68966	35
Y.3	3,7143	1,12646	35
Y.4	3,2286	1,16533	35

Inter-Item Correlation Matrix

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
Y.1	1,000	,745	,740	,661
Y.2	,745	1,000	,595	,469
Y.3	,740	,595	1,000	,522
Y.4	,661	,469	,522	1,000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,579	3,229	3,771	,543	1,168	,060	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	10,7143	6,151	,854	,749	,743
Y.2	10,5429	7,432	,678	,561	,825
Y.3	10,6000	5,482	,703	,554	,802
Y.4	11,0857	5,669	,618	,441	,849

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,3143	10,457	3,23375	4

LAMPIRAN VI Karakteristik Responden

Statistics

		Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Bekerja
N	Valid	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 25 Tahun	7	20,0	20,0	20,0
	26 - 35 Tahun	8	22,9	22,9	42,9
	36 - 45 Tahun	12	34,3	34,3	77,1
	46 - 55 Tahun	5	14,3	14,3	91,4
	Diatas 56 Tahun	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lak-laki	32	91,4	91,4	91,4
	Perempuan	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma III	1	2,9	2,9	2,9
	Sarjana	28	80,0	80,0	82,9
	Pascasarjana	6	17,1	17,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bagian Pemerintahan	5	14,3	14,3	14,3
	Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	4	11,4	11,4	25,7
	Bagian Hukum	3	8,6	8,6	34,3
	Bagian Perekonomian dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam	4	11,4	11,4	45,7
	Bagian Administrasi Pembangunan	4	11,4	11,4	57,1
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	11,4	11,4	68,6
	Bagian Umum	5	14,3	14,3	82,9
	Bagian Organisasi	3	8,6	8,6	91,4
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah 5 Tahun	2	5,7	5,7	5,7
	6 - 10 Tahun	6	17,1	17,1	22,9
	11 - 15 Tahun	8	22,9	22,9	45,7
	16 - 20 Tahun	10	28,6	28,6	74,3
	21 - 25 Tahun	5	14,3	14,3	88,6
	Diatas 26 Tahun	4	11,4	11,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

LAMPIRAN VII Hasil *Output* SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	140	1,00	5,00	3,7786	,92190
Good Governance	105	1,00	5,00	3,8571	,97496
Kualitas Laporan Keuangan	140	1,00	5,00	3,5786	,98964
Valid N (listwise)	105				

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Good Governance, Penerapan SAP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,920 ^a	,846	,836	1,30820

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Penerapan SAP

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	300,778	2	150,389	87,875	,000 ^b
	Residual	54,765	32	1,711		
	Total	355,543	34			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Good Governance, Penerapan SAP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,071	1,105		,064	,949
	Penerapan SAP	,532	,160	,516	3,324	,002
	Good Governance	,537	,195	,428	2,756	,010

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan